



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.05.403429
DIRJEN BADILMILTUN
MAHKAMAH AGUNG RI**

**2
0
2
3**



**UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**



Jalan Pulau Bangka, Padang Baru
Prov. Kep. Bangka Belitung 33684



(0717) 9111513



info@ptun-pangkalpinang.go.id



www.ptun-pangkalpinang.go.id

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2023

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG 403429

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Pulau Bangka Komplek
Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513
PANGKALPINANG - Babel 403429
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	07
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	08
A. Penjelasan Umum.....	08
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	08
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	09
A.3. Basis Akuntansi.....	09
A.4. Dasar Pengukuran.....	09
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	18
B.1. Pendapatan.....	18
B.2. Belanja.....	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	20
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	20
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	21
C.3. Persediaan.....	21
C.4. Utang Kepada Pihak Ketiga.....	22
C.5. Uang Muka dari KPPN.....	22
C.6. Ekuitas.....	22

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	23
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	23
D.2.	Beban Pegawai.....	24
D.3.	Beban Persediaan.....	24
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	25
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	26
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	26
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	27
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	27
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
E.1.	Ekuitas Awal.....	28
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	28
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	28
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	28
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	29
E.5.	Ekuitas Akhir.....	29
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	30
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	30
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	30
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Prov. BABEL. Pangkalpinang - BABEL Telp. 0717-911151

e-mail : pangkalpinang@ptun.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang. The stamp contains the text "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.382.500,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 5.823.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2023 adalah sebesar Rp 14.900.000,- atau mencapai 41,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp 36.175.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2023 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011, Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.250.535,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 6.250.535,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 2.778.420,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 2.778.420,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 3.472.115,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 6.250.535,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan -LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 2.382.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 15.467.600,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 13.085.100,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(DEFISIT) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 13.085.100,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 4.039.715,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 13.085.100,-). kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.517.500,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp. 3.472.115,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)**

	Uraian	Catatan	TA 2023		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1			
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	5.823.000	2.382.500	40,92
	Hibah		0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		5.823.000	2.382.500	40,92
B.	Belanja Negara	B.2			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	36.175.000	14.900.000	41,19
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	00
	Jumlah Belanja Negara		36.175.000	14.900.000	41,19

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 Juni 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	600.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	2.178.420	0
Persediaan	C.1. 3.	3.472.115	4.039.715
Jumlah Aset Lancar		6.250.535	4.039.715
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	0	(0)
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4. 3.	(0)	(0)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		6.250.535	4.039.715
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	2.178.420	
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	600.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.778.420	0
Jumlah Kewajiban		2.778.420	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	3.472.115	4.039.715
Jumlah Ekuitas		3.472.115	4.039.715
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		6.250.535	4.039.715

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.382.500	3.547.000
Jumlah Pendapatan		2.382.500	3.547.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	1.640.000	2.941.892
Beban Barang dan Jasa	D. 4	13.260.000	12.000.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	567.600	50.100
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Jumlah Beban		15.467.600	14.991.992
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(13.085.100)	(11.444.992)
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(13.085.100)	(11.444.992)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2023 DAN 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Ekuitas Awal	E. 1	4.039.715	2.566.575
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(13.085.100)	(11.444.992)
Ekuitas	E. 3		
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.4	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	12.517.500	10.870.492
Kenaikan/penurunan ekuitas		(567.600)	(574.500)
Ekuitas Akhir		3.472.115	1.992.075

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) Aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumberpendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urus Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap asset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengadakan 1X revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA berupa revisi Halaman III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April s/d Juni 2023) tanggal 14 April 2023. Revisi DIPA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mempengaruhi jumlah pagu DIPA. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.823.000	5.823.000
Jumlah Pendapatan	5.823.000	5.823.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	36.175.000	36.175.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	36.175.000	36.175.000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan Rp.
2.382.500

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 2.382.500,-. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan kejaksan dan peradilan lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB

No.	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	600.000	160.000	26,67
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	860.000	900.000	104,65
3.	Pendapatan Kejaksan dan Peradilan lainnya	4.363.000	1.322.500	30,31
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		5.823.000	2.382.500	40,92

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara :
Rp. 14.900.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 14.900.000 atau sebesar 41,19% dari anggaran senilai Rp. 36.175.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2023 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023

Uraian	2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	36.175.000	14.900.000	41,19
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	36.175.000	14.900.000	41,19
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	36.175.000	14.900.000	41,19

Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp 14.417.492,- dari total PAGU Rp 37.050.000,- atau senilai 38,91%, Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 mengalami peningkatan penyerapan anggaran belanja barang yaitu sebesar 2,28%. Hal ini menandakan adanya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat direalisasikan lebih cepat dibandingkan TA 2022.

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp.14.900.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.900.000 dan Rp. 14.417.492. Ada peningkatan nilai penyerapan dan presentase penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan TA yang lalu.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.600.000,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp. 600.000, kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Uang Tunai di Brankas	600.000
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	600.000

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2023 sebesar Rp 2.178.420,- yang merupakan saldo kas bank Bendahara Penerimaan. Kas tunai Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 306.500,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Dana Pihak Ketiga.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Uang Tunai di Brankas	306.500
Uang di Rekening	2.178.420
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	2.484.920

C.3. Persediaan

Persediaan per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp. 3.472.115,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Sesuai dengan berita acara stock opname fisik.

C.4. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp 2.178.420,- yang merupakan dana pihak ketiga yang ada di rekening Bendahara Penerimaan Per Juni 2023. Mutasi rekening RPL 015 PDT PTUN PKP pada Bulan Juni 2023 disajikan sebagai berikut.

	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	TELLER ID
27/06/23	09:28:50	NBMB FADLI AL FARAB TO RPL 015 PDT PTUN	0.00	200,000.00	8888192
27/06/23	08:58:47	BRIVA198455032306270011NBMBBUP ATI BANGKA	0.00	470,000.00	8888386
27/06/23	07:03:05	Sisa Panjar 4 G 2023 PTUN PGP	356,000.00	0.00	0374606
24/06/23	17:39:36	BRIVA198455032306240010NBMBJOSE FERRY SH BRIVA198455032306240010NBMBJOSE FERRY, S ESB:NBMB:0200200P:550439745003	0.00	62,500.00	8888326
22/06/23	19:37:34	BRIVA198455032306220009NBMBBUP ATI BANGKA ESB:NBMB:0200200P:549636305347	0.00	45,500.00	8888196
22/06/23	16:46:21	Sisa Panjar 2 G 2023 PTUN PGP ESB:T:0374673:CMS	103,000.00	0.00	0374673
15/06/23	07:01:00	Sisa Panjar 1 G 2023 PTUN PGP ESB:T:0374645:CMS	220,000.00	0.00	0374645
09/06/23	11:14:04	BRIVA198455032306090008NBMBADIT YA PRATAM ESB:NBMB:0200200P:544210227508	0.00	657,000.00	8888311
07/06/23	10:27:00	YBS; ESB:INDS:0002800D:24947e29f378	0.00	400,000.00	5765051
OPENING BALANCE			TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
1,022,420.00			679,000.00	1,835,000.00	2,178,420.00

C.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari
KPPN
:
Rp.600.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 600.000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
3.472.115

Ekuitas per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 3.472.115,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp :
Rp.2.382.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 Rp. 2.382.500

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023

No.	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	600.000	160.000	30,34
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	860.000	900.000	57,23
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	4.363.000	1.322.500	66,14
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		5.823.000	2.382.500	58,54

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Beban Gaji Pokok PNS	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0
Beban Tunj. Anak PNS	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0
Beban Tunj. PPh PNS	0
Beban Tunj. Beras PNS	0
Beban Uang Makan PNS	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0
Total Beban Pegawai	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
: Rp. 1.640.000

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar Rp. 1.640.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Beban Persediaan Konsumsi	1.640.000
Total Beban Persediaan	1.640.000

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :*

Rp.

13.260.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2023 sebesar Rp. 13.260.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Beban Barang Non Operasional lainnya dan Beban Jasa Profesi

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Beban Bahan	1.260.000
Beban Jasa Konsultan	12.000.000
Total Beban Barang dan Jasa	13.260.000

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 567.600,-*

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 567.600,-

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	567.600
Total Beban Pemeliharaan	567.600

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp. 0*

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2023 sebesar Rp. 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Beban Perjalanan Biasa	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni TA 2023 sebesar Rp 0

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Beban Amortisasi Software	0
Beban Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023

Uraian	TA 2023
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp 4.039.715,-
Rp. 4.039.715

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah
(Rp 13.085.100) sebesar (Rp.13.085.100). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp0 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas : Rp 12.517.500,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.12.517.500,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	14.900.000
Diterima Dari Entitas Lain	(2.382.500)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	12.517.500

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp. (2.382.500) sedangkan DKEL sebesar Rp 14.900.000,-

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 3.472.115,-
Rp. 3.472.115,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2023 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Tahunan Tahun 2023.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp2.178.420,-

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2023 terdapat 1 (satu) kali Revisi DIPA yaitu :
Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan II (April s/d Juni 2023) pada Halaman III DIPA tanggal 14 April 2023.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2023 tidak terdapat ralat SPM, SSBP, maupun SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan Semester I Tahun 2023 ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000	0	600,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,178,420	0	2,178,420	0.00
Persediaan	3,472,115	4,039,715	(567,600)	(14.05)
JUMLAH ASET LANCAR	6,250,535	4,039,715	2,210,820	54.73
JUMLAH ASET	6,250,535	4,039,715	2,210,820	54.73
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,178,420	0	2,178,420	0.00
Uang Muka dari KPPN	600,000	0	600,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,778,420	0	2,778,420	
JUMLAH KEWAJIBAN	2,778,420	0	2,778,420	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,472,115	4,039,715	(567,600)	(14.05)
JUMLAH EKUITAS	3,472,115	4,039,715	(567,600)	(14.05)
JUMLAH EKUITAS	3,472,115	4,039,715	(567,600)	(14.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,250,535	4,039,715	2,210,820	54.73

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH
197110121992032001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 05

SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:35 AM

Halaman : 1

lap_ira_face_saker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	5,823,000	2,382,500	(3,440,500)	41	6,059,000	3,547,000	2,512,000	59
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	5,823,000	2,382,500	(3,440,500)	41	6,059,000	3,547,000	2,512,000	59
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	36,175,000	14,900,000	21,275,000	41	37,050,000	14,417,492	22,632,508	39
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 05

SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:35 AM

Halaman : 2

lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	36,175,000	14,900,000	21,275,000	41	37,050,000	14,417,492	22,632,508	39
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Bintang

ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH
197110121992032001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 403429
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/07/23 9:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_salker
Tgl Data : 24/7/23 6:45 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,900,000	2,900,000	1,260,000	0	1,260,000	43.45	1,640,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,900,000	2,900,000	1,260,000	0	1,260,000	43.45	1,640,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,300,000	4,300,000	1,640,000	0	1,640,000	38.14	2,660,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,300,000	4,300,000	1,640,000	0	1,640,000	38.14	2,660,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	28,800,000	12,000,000	0	12,000,000	41.67	16,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,800,000	28,800,000	12,000,000	0	12,000,000	41.67	16,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	175,000	175,000	0	0	0	0	175,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	175,000	175,000	0	0	0	0	175,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	36,175,000	36,175,000	14,900,000	0	14,900,000	41.19	21,275,000
	JUMLAH BELANJA	36,175,000	36,175,000	14,900,000	0	14,900,000	41.19	21,275,000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
 PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:35 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,382,500	3,547,000	(1,164,500)	(32.831)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,382,500	3,547,000	(1,164,500)	(32.831)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,382,500	3,547,000	(1,164,500)	(32.831)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	1,640,000	2,941,892	(1,301,892)	(44.254)
Beban Barang dan Jasa	13,260,000	12,000,000	1,260,000	10.5
Beban Pemeliharaan	567,600	50,100	517,500	1,032.9
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	34
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:35 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,467,600	14,991,992	475,608	3.172
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(13,085,100)	(11,444,992)	(1,640,108)	14.33
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13,085,100)	(11,444,992)	(1,640,108)	14.33
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(13,085,100)	(11,444,992)	(1,640,108)	14.33

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:35 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,039,715	2,566,575	1,473,140	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,085,100)	(11,444,992)	(1,640,108)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,517,500	10,870,492	1,647,008	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(567,600)	(574,500)	6,900	-
EKUITAS AKHIR	3,472,115	1,992,075	1,480,040	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH
197110121992032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,178,420	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,472,115	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,178,420
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	600,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	14,900,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,382,500	0
0.0	391111	Ekuitas	0	4,039,715
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	160,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	900,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,322,500
3.0	521211	Beban Bahan	1,260,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	12,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,640,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	567,600	0
JUMLAH			24,100,635	24,100,635

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 10:58 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	14,900,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,382,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	160,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	900,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,322,500
3.0	521211	Belanja Bahan	1,260,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,640,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	12,000,000	0
JUMLAH			17,282,500	17,282,500

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 403429
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	36,175,000	36,175,000	0
2	Belanja	14,900,000	14,900,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	5,823,000	5,823,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,382,500	2,382,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	600,000	600,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000	600,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03-JUL-23



KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT UAPPA-WILAYAH

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

Kode BA dan Nama K/L: (005) MAHKAMAH AGUNG

Kode E1 dan Nama E1: (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

Kode UAPPA-W dan Nama UAPPA-W : (005.05.3000) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
1. KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA, Neraca, LO dan LPE face	√		Ada
2. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
4.	n/a	n/a	Ada
<i>UAPPA-E1/UAPA dapat menambahkan Laporan yang harus disampaikan/dilampirkan dalam LK UAPPA-W sesuai dengan kebutuhan UAPPA-E1/UAPA dalam penyajian dan pengungkapan LKKL.</i>			
2. KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN MonSAKTI			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan MonSAKTI termasuk perbandingan dengan tahun 2022 ?	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan MonSAKTI sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
3. PENGGUNAAN APLIKASI			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?	√		Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>			
4. KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di MonSAKTI melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		√	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
5. NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGCEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? Cek juga di MonSAKTI, menu "Daftar >> Akun Non Ref"		√	Tidak

2.	Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek MonSAKTI, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN				
AKUN ASET (1xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister" ? Dalam LK Tahunan tidak boleh ada akun "Belum diregister"		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
Akun dengan "frasa BLU"		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun Persediaan, Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi, dan Beban terkait Aset dengan frasa BLU?		√	Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2019 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>				
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ya/Tidak
2.	Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?		√	Ya/Tidak
3.	Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?	n/a	n/a	Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL.</i>				
4.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 ?	n/a	n/a	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
2.	Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211				
1.	Nilai selisih TK/TM (excel MonSAKTI) secara Absolut	Rp		-
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari MonSAKTI (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp		-
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Akun Pendapatan Bukan Pajak (42xxxx)				
Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2020 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx (Akun 423xxx tidak boleh ada)		√	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak

4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksan terdapat pada Kementerian Kesehatan)		√	Tidak
2. Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)			
1. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU			
	Ada/Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2. Apakah telah melakukan identifikasi transaksi belanja/pendapatan dengan Satker Pemerintah Pusat lainnya (Untuk eliminasi BLU) ?	n/a	n/a	Ya
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Rp.0		
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	Rp.0		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.0		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar.			
6. LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak

Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang		√		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO		n/a	n/a	Ya
Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.				
7. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			√	Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?		n/a	n/a	Ya
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√		Sama
Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111				
Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?		n/a	n/a	Ya
8. NERACA				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)		√		Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?			√	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Semester I Tahun 2023 dengan Audited 2022, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?			√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2022, Apakah demikian?		n/a	n/a	Ya
9. TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"				
Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi SAKTI ?		√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang		Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		n/a	n/a	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		n/a	n/a	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang		Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		n/a	n/a	Ada
Pengecekan persediaan		Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:		√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)		√		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			√	Ada/Tidak

- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)		√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	n/a	n/a	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	n/a	n/a	Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?	n/a	n/a	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	n/a	n/a	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada
10.KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal S awal?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Semester I Tahun 2023?		√	Tidak
<i>Pada MonSAKTI G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	n/a	n/a	Ya
11.LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus</i>)		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker In-Aktif Bersaldo ?		√	Tidak
4. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker In-Aktif Tidak Bersaldo ?		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
7. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>MonSAKTI Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
Pengecekan TDK Hibah dengan SPAN	Ada	Tidak	Seharusnya

1. Adakah TDK Hibah Langsung dengan SPAN? <i>Data selain dilihat dari SPAN, juga dapat diperoleh dari Dit. APK, DJPB.</i>		√	Tidak
12. PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	n/a	n/a	Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	n/a	n/a	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	n/a	n/a	Ya
8.			Ya
13. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketika nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	n/a	n/a	
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	n/a	n/a	
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	n/a	n/a	Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	n/a	n/a	Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	n/a	n/a	Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN			

Mengetahui

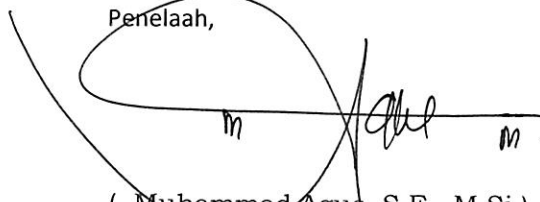
Pejabat Penyusun LKKL,



(Romatua Lasma Sembiring, S.H.)
NIP : 197110121992032001

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Penelaah,



(Muhammad Agus, S.E., M.Si.)
NIP : 198502072006041001

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

Kode BA dan Nama K/L: (005) MAHKAMAH AGUNG

Kode E1 dan Nama E1: (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

Kode UAPPA-W dan Nama UAPPA-W : (005.05.3000) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Kode UAPPA dan Nama UAPPA : (403429) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
1. KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA, Neraca, LO dan LPE face	✓		Ada
2. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
4.	n/a	n/a	Ada
<i>UAPPA-E1/UAPA dapat menambahkan Laporan yang harus disampaikan/dilampirkan dalam LK UAPPA-W sesuai dengan kebutuhan UAPPA-E1/UAPA dalam penyajian dan pengungkapan LKKL.</i>			
2. KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN MonSAKTI			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan MonSAKTI termasuk perbandingan dengan tahun 2022 ?	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan MonSAKTI sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
3. PENGGUNAAN APLIKASI			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?	✓		Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>			
4. KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di MonSAKTI melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama

5. NERACA PERCOBAAN AKRUAL

PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? Cek juga di MonSAKTI, menu "Daftar >> Akun Non Ref"		√	Tidak
2.	Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek MonSAKTI, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN				
AKUN ASET (1xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister" ? Dalam LK Tahunan tidak boleh ada akun "Belum diregister"		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
Akun dengan "frasa BLU"		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun Persediaan, Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi, dan Beban terkait Aset dengan frasa BLU?		√	Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2019 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>				
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ya/Tidak
2.	Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?		√	Ya/Tidak
3.	Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?	n/a	n/a	Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL.</i>				
4.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 ?	n/a	n/a	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
2.	Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211				
1.	Nilai selisih TK/TM (excel MonSAKTI) secara Absolut	Rp		-
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari MonSAKTI (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTMT secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp		-
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya

1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Akun Pendapatan Bukan Pajak (42xxxx)			
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2020 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (Akun 423xxx tidak boleh ada)		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan)		√	Tidak
2. Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)			
1. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU			
	Ada/Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2. Apakah telah melakukan identifikasi transaksi belanja/pendapatan dengan Satker Pemerintah Pusat lainnya (Untuk eliminasi BLU) ?	n/a	n/a	Ya
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan			
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Rp.0		
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	Rp.0		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.0		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar.			

6. LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	n/a	n/a	Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			

7. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?		√	Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?	n/a	n/a	Ya
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	n/a	n/a	Ya

8. NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)	√		Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?		√	Tidak
Dari kolom perbandingan antara Tahun 2023 dengan Audited 2022, adakah			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2022, Apakah demikian?	n/a	n/a	Ya

9. TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi SAKTI ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyenyisihan TP/TGR (Neraca)	n/a	n/a	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	n/a	n/a	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	n/a	n/a	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)		√	Ada/Tidak
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)		√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	n/a	n/a	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	n/a	n/a	Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?	n/a	n/a	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	n/a	n/a	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada
10.KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Semester I Tahun 2023?		√	Tidak
<i>Pada MonSAKTI G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal			
3. Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	n/a	n/a	Ya

11.LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker In-Aktif Bersaldo ?		√	Tidak
4. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker In-Aktif Tidak Bersaldo ?		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
7. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
MonSAKTI Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			
Pengecekan TDK Hibah dengan SPAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah TDK Hibah Langsung dengan SPAN? Data selain dilihat dari SPAN, juga dapat diperoleh dari Dit. APK, DJPB.		√	Tidak
12.PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	n/a	n/a	Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	n/a	n/a	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	n/a	n/a	Ya
8.			Ya
13. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)			
	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	n/a	n/a	
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	n/a	n/a	

4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	n/a	n/a	Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	n/a	n/a	Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	n/a	n/a	Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN			

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

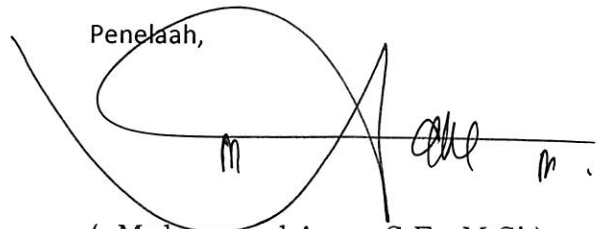


(Romatua Lasma Sembiring, S.H.)

NIP : 197110121992032001

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Penelaah,



(Muhammad Agus, S.E., M.Si.)

NIP : 198502072006041001

**REKAPITULASI DAFTAR REKENING BANK
PER 30 JUNI 2023**

URAIAN	NOMOR REKENING	NAMA BANK
BENDAHARA PENGELUARAN	651554034291000 (BPG 015 PTUN PKP 403429)	BRI
BENDAHARA PENERIMAAN	-	-
REKENING LAINNYA	0063-01-002185-30-7 (RPL 015 PDT PTUN PKP)	BRI

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Sekretaris


ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING
PERIODE 30 JUNI 2023
KHUSUS PENUTUPAN DI TAHUN 2023

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
WILAYAH BANGKA BELITUNG									
NIHIL									

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Sekretaris



ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001



FORMULIR JURNAL BALIK

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 0 DIRJEN BADILMILTUN MA RI
 Wilayah : 3000 BANGKA BELITUNG
 Satuan Kerja : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
 No. Dokumen : Jurnal Balik Atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
 Tanggal : 1 Januari 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Jurnal Balik Atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kategori Jurnal Balik

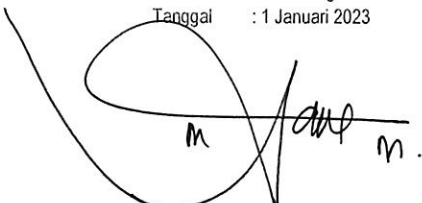
☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Penghapusan Piutang	☐ Transfer Masuk
☐ Penyusutan Aset	☐ Transfer Keluar
☒ Kas Di Bendaharan Penerimaan	☐ Reklasifikasi Neraca
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	☐ Koreksi
☐ Persediaan	☐ Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2.347.420	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		2.347.420
Total				2.347.420	2.347.420

Dibuat oleh : Kasubbag Umum dan Keuangan
 Tanggal : 1 Januari 2023

Disetujui oleh : KPA
 Tanggal : 1 Januari 2023

Direkam oleh : Operator GLP
 Tanggal : 1 Januari 2023


 Muhammad Agus, S.E., M.Si.
 NIP.198502072006041001


 (Romatua Lasma Sembiring, S.H.)
 NIP : 197110121992032001


 Rosalina, S.E.
 NIP.199208082019032017

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Jurnal Manual.

BA : 005 MAHKA MAH AGUNG RI
ESELON I : DIRJEN BADILMILITUN MA RI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2023					Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank			Total	
						Saldo	Saldo Bank	Bank dan No Rek		
1	3000	Bangka Belitung	403429	PTUN Pangkalpinang	Rp 600.000	Rp -	BRI Cab Pangkalpinang 651554034291000 (BPG 015 PTUN PKP 403429)	600.000	Rp	Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp 600.000,-
					Rp -				Rp	- Kuilansi UP
					Rp -				Rp	Selisih karena Kesulitan Mencari pecahan
					Rp 600.000	Rp -			Rp	600.000 Jumlah UP

Şekretaris

ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : DIRJEN BADILMILITUN MA RI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 403429 PENGADILAN TATA U

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2023				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	Bangka Belitung	403429	Pengadilan	Rp306.500,00	Rp 2.178.420,00	0063-01-002185-30-7	Rp 2.484.920,00	
				Tata Usaha Negara Pangkalpinang			(RPL 015 PDT PTUN PKP)		
							BRI		



ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

LAPORAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
PERIODE 1 JANUARI 2023 S.D 30 JUNI 2023

Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir			
Januari sd. Juni 2023	Biaya Perkara	Rp 2.692.920	Rp 21.273.000	Rp 21.481.000	Rp 2.484.920	Rp	2.178.420	Rp 306.500
	Biaya Eksekusi	Rp -	Rp -	Rp -		Rp	-	
	Biaya Konsiyasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp	-	
	Jumlah	Rp 2.692.920	Rp 21.273.000	Rp 21.481.000	Rp 2.484.920	Rp	2.178.420	Rp 306.500

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
 Sekretaris



Romatua Lasma Sembiring, S.H.
 NIP 19711012 199203 2 001

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758955, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN) (05)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG (403429)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILMILT (032901004360307)
Virtual Account : 651554034291000 | BPG 015 PTUN PKP 403429
Periode : 01-06-2023 s/d 30-06-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-06-08	10:24:57	14077935	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang 230151301008922000001	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	SPAN	
2023-06-20	14:14:49	14521223	rosalina	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-06-23	13:32:58	14610205	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang 230151301010108000001	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	SPAN	
2023-06-23	13:45:40	14611428	rosalina	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi					840.000,00	840.000,00			
Saldo Akhir							0,00		

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

Account Statement**Last Update : 27 Jun 2023 13:49:00****Account No** : 0063-01-002185-30-7**Account Name** : RPL 015 PDT PTUN PKP**Account Status** : Active**Today Hold Balance** : 0.00**Period** : 01/06/2023 - 27/06/2023

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
27/06/23	09:28:50	NBMB FADLI AL FARAB TO RPL 015 PDT PTUN	0.00	200,000.00	8888192
27/06/23	08:58:47	BRIVA198455032306270011NBMBBUP ATI BANGKA	0.00	470,000.00	8888386
27/06/23	07:03:05	Sisa Panjar 4 G 2023 PTUN PGP	356,000.00	0.00	0374606
24/06/23	17:39:36	BRIVA198455032306240010NBMBJOSE FERRY SH BRIVA198455032306240010NBMBJOSE FERRY, S ESB:NBMB:0200200P:550439745003	0.00	62,500.00	8888326
22/06/23	19:37:34	BRIVA198455032306220009NBMBBUP ATI BANGKA ESB:NBMB:0200200P:549636305347	0.00	45,500.00	8888196
22/06/23	16:46:21	Sisa Panjar 2 G 2023 PTUN PGP ESB:T:0374673:CMS	103,000.00	0.00	0374673
15/06/23	07:01:00	Sisa Panjar 1 G 2023 PTUN PGP ESB:T:0374645:CMS	220,000.00	0.00	0374645
09/06/23	11:14:04	BRIVA198455032306090008NBMBADIT YA PRATAM ESB:NBMB:0200200P:544210227508	0.00	657,000.00	8888311
07/06/23	10:27:00	YBS; ESB:INDS:0002800D:24947e29f378	0.00	400,000.00	5765051

OPENING BALANCE	TOTAL DEBET	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
1,022,420.00	679,000.00	1,835,000.00	2,178,420.00

BAGIAN ANGGARAN 005.05



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

**DIRJEN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov

Telp. 07179111513

Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER I TAHUN 2023

Kata Pengantar

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I Tahun 2023 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Kuasa Pengguna Barang



Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16
V. Kendala dan Saran	18

5.1. Kendala	18
5.2. Saran	18
VI. Penutup	19

Lampiran

- I. Catatan Ringkas Barang Milik Negara
- II. Laporan Barang Intrakomptabel
- III. Laporan Barang Ekstrakomptabel
- IV. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- V. Laporan Aset Tak Berwujud
- VI. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan
- VII. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca Laporan
- VIII. Persediaan dan BA Opname Fisik
- IX. Laporan Hibah
- X. Laporan Penyusutan BMN

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN dalam SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkai pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Dapat diperbandingkan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 Aset Tetap

A. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. Aset Barang Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. Proses Penyusunan Laporan

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan dengan melihat aplikasi SAKTI tingkat wilayah yang akan secara otomatis menampilkan data-data yang diperlukan pada proses rekonsiliasi. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Neraca Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 3.472.115,00 (*Tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	3.472.115
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tak Berwujud	0
Akumulasi Penyusutan Software	0

Aset Lainnya		0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		0
Total		3.472.115

Berikut table dan grafik nilai BMN Semester II 2022 dengan Semester I 2023.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*

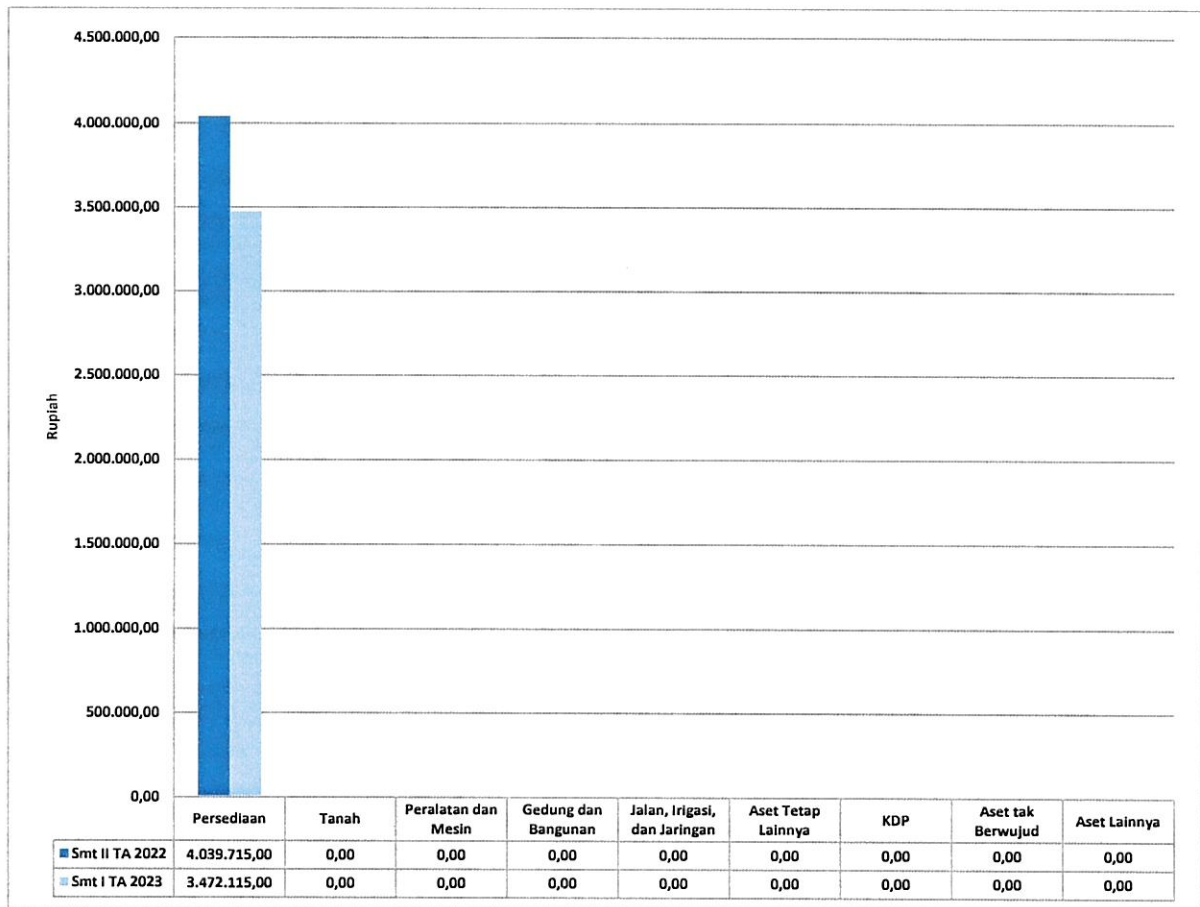
<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TA_2022</i>	<i>SEMESTER I TA_2023</i>
Persediaan	4.039.715	3.472.115
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0

Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	4.039.715	3.472.115

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. Aset Tetap

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan;
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan.

4.2.3. Persediaan

Nilai Persediaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 mengalami perubahan nilai yang disebabkan pembelian, transfer masuk dan pemakaian barang persediaan.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER II TA 2021</i>	<i>SEMESTER II TA 2022</i>
Barang Konsumsi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	4.039.715	3,472,115

4.2.3 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023.

4.3 Posisi BMN di Neraca

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

SEMESTER I TAHUN 2023

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	3.472.115	3.472.115
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	3.472.115	3.472.115

V. Kendala dan Saran

5.1. Kendala

Tidak ada kendala

5.2. Saran

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementrian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempertahankan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya di bidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

NAMA UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Tanggal : 25/07/2023 11.45.53
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbrmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

Pangkalpinang, 29 June 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris


Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

*LAMPIRAN II
LAPORAN BMN
INTRAKOMPTABEL*

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/07/23 11:47 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG							
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Romatua Larma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

*LAMPIRAN III
LAPORAN BMN
EKSTRAKOMPTABEL*

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005

UAPPB-E1 : 403429

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 11:48 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_salker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
						KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
KODE	URAIAN		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris



Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

*LAMPIRAN IV
LAPORAN BMN
GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL*

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/07/23 11:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG					
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris



Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP. 197110121992032001

LAMPIRAN V
LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM
Tanggal : 25/07/23 11:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_saiker

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
KODE	URAIAN	3	4	Kuantitas	Nilai	6	Kuantitas	BERTAMBAH		BERKURANG		Kuantitas	Nilai
								Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
1	2				5			7		8	9	10	11

*LAMPIRAN VI
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL*



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung

Pangkalpinang - Bangka 33684 Telp / Fax. (0717) 9111513

Email : info@ptun-pangkalpinang.go.id Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (403429) SEMESTER I TAHUN 2023 NOMOR : W5.TUN5/ 424b /KU.01/06/2023

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2023), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Fanny Ruspanji, S.E.I.**
NIP : **19900412 202012 1 009**
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : **Rosalina, S.E.**
NIP : **199208082019032017**
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 30 Juni Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2023		
		Saldo Awal per 01 Januari 2023	Mutasi	Saldo Akhir per 30 Juni 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	4.039.715	32.400	4.072.115
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	600.000	600.000
2	Persediaan	4.039.715	-567.600	3.472.115
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	4.039.715	32.400	4.072.115
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	4.039.715	32.400	4.072.115

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 30 Juni Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Modul Aset Tetap

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 19900412 202012 1 009

Operator GLP

Rosalina, S.E.
NIP. 19920808 201903 2 017

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



Romatua Hasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 Keuangan	 barang

II. PERIODE	
0 6 / 2 3	

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 5 - 3 0 0 0 - 4 0 3 4 2 9 - 0 0 0 - K D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	4.039.715	4.039.715	4.039.715
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	4.039.715	4.039.715	4.039.715
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	(Akumulasi Penyusutan)	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	4.039.715	4.039.715	4.039.715
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	4.039.715	4.039.715	4.039.715

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	0	0	0	0
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	(Akumulasi Penyusutan)	0	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 barang

II. PERIODE	
0 6 / 2 3	

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 5 - 3 0 0 0 - 4 0 3 4 2 9 - 0 0 0 - K D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR	0	0	0	0	0
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0	0	0
B.	ASET TETAP	0	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
barang	keuangan

II. PERIODE	
06	23

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	00503000403429000KD
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN							
No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
NIHIL							

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN							
No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
NIHIL							

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN						
No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Keterangan
NIHIL						

*LAMPIRAN VII
LAPORAN POSISI BMN
DAN KEUANGAN PADA
NERACA*

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl.Data : 25/07/23 6:00 AM
Tgl.Cetak : 25/07/23 11:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,472,115
J U M L A H		3,472,115

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris



Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 30/07/23 7:37 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000	0	600,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,178,420	0	2,178,420	0.00
Persediaan	3,472,115	4,039,715	(567,600)	(14.05)
JUMLAH ASET LANCAR	6,250,535	4,039,715	2,210,820	54.73
JUMLAH ASET	6,250,535	4,039,715	2,210,820	54.73
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,178,420	0	2,178,420	0.00
Uang Muka dari KPPN	600,000	0	600,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,778,420	0	2,778,420	
JUMLAH KEWAJIBAN	2,778,420	0	2,778,420	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,472,115	4,039,715	(567,600)	(14.05)
JUMLAH EKUITAS	3,472,115	4,039,715	(567,600)	(14.05)
JUMLAH EKUITAS	3,472,115	4,039,715	(567,600)	(14.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,250,535	4,039,715	2,210,820	54.73

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 30 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001

*LAMPIRAN VIII
LAPORAN PERSEDIAAN
DAN BERITA ACARA
OPNAME FISIK*



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33684

Telepon : 0717 – 9111513, Email: pangkalpinang@ptun.org

Website: ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

Nomor : W5-TUN5/ 423a /KU.01/06/2023

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker : 403429
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Ketua.
2. Nama : Rosalina, S.E. (Kasub Bag PTIP)
NIP : 199208082019032017
Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Bendahara).
NIP : 199004122020121009
Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester I Tahun 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33684

Telepon : 0717 – 9111513, Email: pangkalpinang@ptun.org

Website: ptun-pangkalpinang.go.id

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si.

2. Nama : Rosalina,S.E.

3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

.....
Romatua Lasma Sembiring,SH
NIP. 197110121992032001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan

Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33148

Telp / Fax. (0717) 9111513

Email : pangkalpinang@ptun.org

Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Kode Satker : 005013000403429000KD.
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

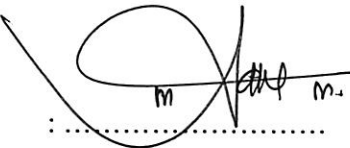
No.	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	1010305999000003	Bendera Merah Putih	1	1	0	√	-
2	1010305999000004	Bendera Pengadilan	1	1	0	√	-
3	1010305999000005	Kain Laken	1	1	0	√	-

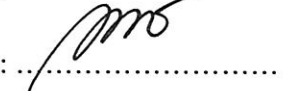
Tim Pelaksana Stock Opname :

1. MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.

2. ROSALINA, S.E.

3. FANNY RUSPANJI, S.E.I.


:

:

:

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA BARANG


ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 197110121992032001

LAMPIRAN IX
LAPORAN HIBAH

DAFTAR ASET HASIL PEROLEHAN HIBAH TAHUN 2023

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 05 DIREKTORAT JENDRAL BADMILITUN
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
 SATKER : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SATUAN KERJA	NAMA SATKER	BENTUK HIBAH	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BARANG	KET
1	403429	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang				NIHIL	

Pangkalpinang, 30 JUNI 2023
 Kuasa Pengguna Barang


 Romatua Lasma Sembiring, S.H.
 NIP. 19711012 199203 2 001

LAMPIRAN X
LAPORAN PENYUSUTAN
BMN

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 30/07/23 8:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_skel_satker

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO 30 JUNI 2023				NILAI BUKU	
KODE	URAIAN	3	4	5	6	AKUMULASI PENYUSUTAN		TOTAL	10=5-9
						BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI		
1	2					7	8	9=6+7+8	

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 30/07/23 8:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_skel_satker

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO 30 JUNI 2023				NILAI BUKU	
KODE	URAIAN	3	4	5	AKUMULASI PENYUSUTAN			TOTAL	
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI		
1	2				6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM
Tanggal : 30/07/23 8:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_skel_satker

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2023								
KODE	URAIAN	SAT		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
		3		4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
1	2									